

SIKAP, Vol 4 (No. 1), 2019, hal 66-80
p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN : 2599-1876

SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>

MANFAAT INFORMASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dedi Sutrisna Syah Putra¹, Sri Mulyani²

Universitas Padjadjaran^{1,2}

dedisutrisnasyahputra@gmail.com¹, s.mulyani@unpad.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan informasi laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual dan akun yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh penggunanya. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus di Pemerintah Kota Depok. Pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara serta penelaahan dokumen. Analisis data hasil wawancara dan penelaahan dokumen menggunakan *Interactive Model of Analysis*, sedangkan data kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengguna memanfaatkan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Pemanfaatan informasi laporan keuangan tersebut adalah untuk pengambilan keputusan yang berbeda beda, yaitu : 1) Laporan realisasi anggaran (LRA) bermanfaat untuk pengambilan keputusan perencanaan dan evaluasi kinerja anggaran; 2) neraca bermanfaat untuk pengambilan keputusan pengelolaan aset dan kewajiban; 3) laporan arus kas (LAK) bermanfaat untuk pengambilan keputusan kebutuhan arus kas, tetapi kurang bermanfaat dalam pengambilan keputusan kondisi keuangan; 4) laporan operasional (LO) bermanfaat untuk pengambilan keputusan evaluasi hasil operasi pemerintah, tetapi masih terdapat persepsi bahwa laporan operasional dibuat hanya untuk memenuhi ketentuan basis akrual; 5) catatan atas laporan keuangan (CaLK) dinilai cukup menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Kata kunci: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual; Pengambilan Keputusan*

DETERMINE FINANCIAL STATEMENT INFORMATION ACCRUAL-BASED FOR DECISION MAKING

Abstract

This study aims to determine the use of accrual-based and account local government financial statement information which is the basis for consideration in decision making by users. This research is a case study in the Depok City Government. Data collection through questionnaires and interviews and document review. Analysis of data from interviews and document review using Interactive Model of Analysis, while questionnaire data were analyzed using descriptive statistics. The results of the study show that users use accrual-based information on Local Government Financial Statements in the process of making decisions. The utilization of financial statement information is for different decision making, namely: 1) Budget realization statement (LRA) is useful for decision making in planning and evaluating budget performance; 2) balance sheet is useful for making asset and liability management decisions; 3) cash flow statement (LAK) is useful for decision making for cash flow needs, but is less useful in making financial decision making; 4) operational statement (LO) are useful for decision making on evaluating the results of government operations, but there is still a perception that operational reports are made only to meet the accrual basis; 5) notes to the financial statements (CaLK) are considered sufficient to provide useful information for decision making.

Keywords: *Accrual-Based Regional Government Financial Statements; Decision Making*

PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi pada sektor publik merupakan salah satu hal yang menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir, dimana akuntansi berbasis akrual memegang peranan penting dalam pelaksanaan *New Public Management* (NPM). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, mulai tahun anggaran 2015, instansi pemerintahan di Indonesia harus menyusun laporan keuangannya menggunakan akuntansi berbasis akrual, sesuai Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama dalam pengambilan keputusan (Andriani, Kober & Ng, 2010; Kobayashi, Yamamoto & Ishikawa, 2016) serta dapat mengarahkan pada manajemen kinerja yang baik (Ernst & Young, 2010). Blondal (2003) dalam Susanto (2015) mengatakan bahwa tujuan perubahan basis akuntansi menjadi basis akrual agar laporan keuangan pemerintah dapat menyediakan informasi secara lebih luas dan lengkap sehingga dapat memperbaiki pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Andriani *et al* diketahui bahwa informasi yang terdapat pada laporan keuangan sektor publik berbasis akrual dirasakan kebergunaannya dalam 16 dari 19 situasi pengambilan keputusan pada sektor publik di Australia. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Kober *et al* (2010) bahwa informasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual (GAAP-akrual) dinilai lebih memberikan manfaat dibandingkan informasi pada basis lainnya. Galera *et al* (2016) salah satu komponen laporan keuangan berbasis akrual yakni laporan operasional dipandang relevan dalam menganalisis keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa dan sumber daya yang diperlukan di masa yang akan datang.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah berbasis akrual ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil penelitian Pessina *et al* (2016) menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah berbasis akrual belum menggambarkan posisi keuangan pemerintah. karena belum ada indikator likuiditas dan solvabilitas. Sementara itu, penelitian Natalia dan Marwata (2014) menemukan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga kurang memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, Djuminah dan Susanto (2015) mengatakan adanya kemungkinan pemanfaatan informasi akuntansi berbasis akrual dapat meningkat seiring dengan berkembangnya tingkat pemahaman, komitmen dan pengalaman dalam penerapannya. Merujuk pada peneliti Djuminah dan Susanto tersebut, dan mengingat akuntansi berbasis akrual sudah diterapkan beberapa tahun di instansi pemerintahan di Indonesia, serta masih adanya perbedaan hasil penelitian mengenai kegunaan informasi akuntansi berbasis akrual ini, maka dalam penelitian ini akan dilihat pemanfaatan laporan keuangan berbasis akrual dalam proses pengambilan keputusan para penggunanya. Juga akan dilihat akun-akun apa yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Kota Depok, karena Kota Depok merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang cukup besar.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Decision Usefulness Theory

Ketentuan-ketentuan informasi akuntansi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan merupakan lingkup *decision usefulness theory* (Octavia, 2018). *Decision usefulness theory* menjadi dasar teori dalam membuat kerangka konseptual (Staubus, 2000 dalam Octavia, 2018). Teori ini juga menjadi dasar dalam menilai kegunaan komponen laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, karena laporan keuangan mencerminkan informasi keuangan yang berkualitas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa informasi laporan keuangan dapat

berguna dalam memenuhi kebutuhan pengguna dikarenakan pada laporan keuangan terdapat karakteristik kualitatif yang menjamin kualitas informasi yang disajikan.

Adapun, teori yang dapat mendukung pengambilan keputusan, salah satunya adalah *single person theory of decision* (Pratiwi, 2010). *Single person theory of decision* ini membantu memahami perilaku individu dalam melakukan pengambilan keputusan yang rasional bahkan dalam keadaan yang tidak pasti, serta membantu dalam memperkuat keyakinan subjektif atas keputusan yang dibuat, Hal ini merupakan suatu bentuk apresiasi atas konsep informasi (Pratiwi, 2010).

Agency Theory

Godfrey (2010) mengungkapkan bahwa *agency theory* atau *agencies theory* diperkenalkan oleh Jensen dan meckling 1976. Teori ini berfokus pada hubungan antara *principal* dan *agent*. Halim dan Abdullah (2006) mengungkapkan bahwa *principal* membuat suatu perjanjian dengan agen, baik secara eksplisit ataupun implisit yang diharapkan agar agen bertindak sesuai keinginan *principal*. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan hubungan keagenan dimana disatu sisi pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Disisi lain, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kepentingan mereka (Halim dan Abdullah, 2006). Selain itu, pada proses penganggaran juga terjadi hubungan keagenan yang melibatkan dua pihak, yaitu eksekutif sebagai agen dan legilatif sebagai *principal*, dimana kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing.

Proses pengambilan keputusan tidak lepas dari *agency theory*. Dalam proses pengambilan keputusan melibatkan banyak kepentingan, yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini bisa berakibat pada penyediaan informasi yang asimetris (*asymmetric information*), karena salah satu pihak mengutamakan kepentingannya sendiri.

Stakeholder Theory

Freeman (1984) dalam Mainardes *et al* (2011) menerangkan bahwa dalam membuat keputusan strategis, organisasi seharusnya mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*. Adapun yang dimaksud *stakeholder* adalah orang yang mempengaruhi dan dipengaruhi suatu aktivitas atau kebijakan organisasi (Frederick *et al*, 1992 dalam Mainardes *et al*, 2011). *Stakeholder theory* berfokus pada pengambilan keputusan pada suatu entitas, sehingga informasi yang disediakan harus memiliki kegunaan bagi *stakeholders* (Lasmaria, 2014).

Stakeholder theory dapat diterapkan pada sektor publik, terutama pada pemerintah dalam hal pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah (Sukmaningrum, 2012). Dalam hal ini, *stakeholder* dan organisasi memiliki hubungan sosial berupa responsibilitas dan akuntabilitas. Mardiasmo (2009) menerangkan bahwa anggaran sektor publik harus dapat merefleksikan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, dimana masyarakat merupakan *stakeholder*. Bovaird (2005) dan Frey (2003) dalam Sukmaningrum (2012) mengungkapkan bahwa *stakeholder* pemerintah meliputi masyarakat, organisasi bisnis, administrasi publik lainnya, *Non Government Organization*, politisi, lembaga peradilan, media dan pemerintah negara lain, dimana masing-masing memiliki hubungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.

Kegunaan Laporan Keuangan Pemerintah

Kegunaan informasi laporan keuangan pada dasarnya adalah bagaimana informasi laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat (Suwardjono, 2011). Dalam bidang pemerintahan, pelaporan keuangan memiliki tujuan yakni informasi yang disediakan dapat memiliki manfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan kinerja pemerintah, juga dalam pengambilan keputusan terkait sosial, politik, dan ekonomi (Susanto, 2015).

Informasi akuntansi dapat bermanfaat apabila karakteristik kualitatif laporan keuangan terpenuhi, Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif pada laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus dipenuhi informasi akuntansi sehingga tujuannya dapat terpenuhi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami.

Relevansi Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Trihani, (2018) mengatakan kualitas pengambilan keputusan dapat di pengaruhi oleh informasi akuntansi pada laporan keuangan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa informasi dikatakan memiliki relevansi apabila dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu dalam melakukan evaluasi dan koreksi atas peristiwa masa lalu, masa kini serta memprediksi kemungkinan di masa depan, sehingga laporan keuangan pemerintah dapat relevan dan dirasakan manfaatnya dalam hal penentuan alternatif keputusan mana yang seharusnya dipilih.

Relevansi Laporan Realisasi Anggaran dalam Pengambilan Keputusan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan ringkasan data tentang sumber penerimaan dan alokasi belanja pemerintah serta pemanfaatan sumber daya ekonomi pemerintah, juga laporan yang membandingkan anggaran dengan realisasinya. Informasi dalam laporan realisasi anggaran memberikan manfaat *predictive value* dan *feedback value* (Suhartanto. 2013).

Manfaat *Predictive value* berupa informasi yang dapat digunakan untuk menyusun kerangka ekonomi perencanaan pembangunan daerah dan dimanfaatkan untuk memproyeksikan kebijakan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah (Susanto, 2015). Sedangkan manfaat berupa *feedback value* berupa informasi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi manajemen terkait tingkat penerimaan pendapatan, efektivitas dan efisiensi belanja daerah, pemanfaatan dana perimbangan serta melakukan koreksi atas kinerja pemerintah (Suhartanto, 2013). Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan yang paling sering dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada saat penyusunan dan penetapan APBD (Diah Agustijanti, 2016).

Relevansi Neraca dalam Pengambilan Keputusan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa informasi pada Neraca pemerintah mencerminkan posisi keuangan meliputi aset lancar maupun non lancar, kewajiban lancar dan non lancar serta ekuitas.

Suhartanto (2013) mengungkapkan bahwa informasi pada neraca dapat digunakan untuk menilai likuiditas pemerintah daerah, dan untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah. Sementara Natalia dan Marwata (2014) menjelaskan hal yang sama bahwa dalam konteks keputusan membantu mengelola aset dan liabilitas.

Relevansi Laporan Arus Kas dalam Pengambilan Keputusan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar untuk aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Informasi dalam arus kas dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengestimasi penerimaan dan pengeluaran di periode yang akan datang, keputusan investasi pemerintah, dan keputusan pendanaan pemerintah.

Relevansi Catatan Atas Laporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan

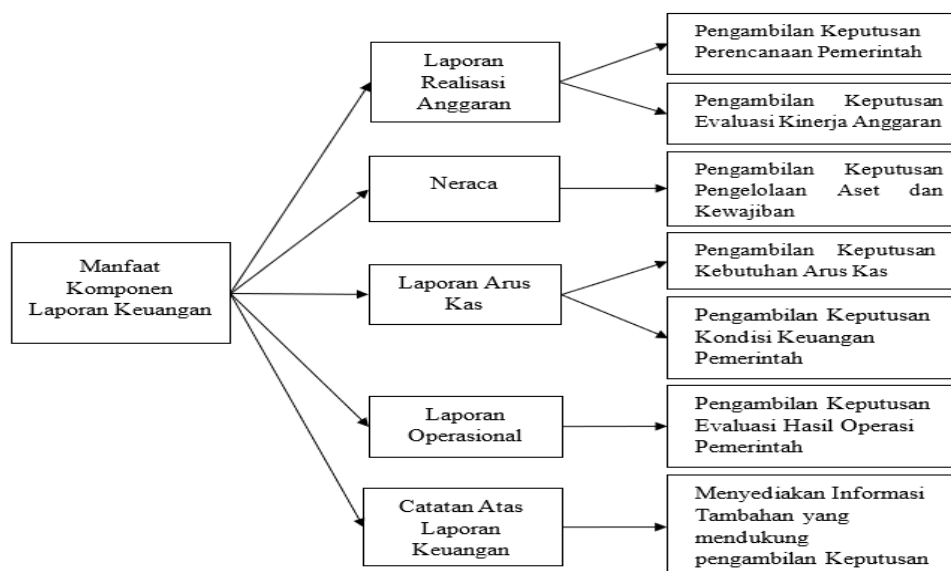
Informasi yang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi : 1) informasi tentang entitas pelaporan dan akuntansi secara umum; 2) informasi mengenai kebijakan keuangan dan ekonomi makro, ringkasan perolehan target keuangan sepanjang periode pelaporan beserta masalah yang meliputi; 3) informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan; 4) informasi lain yang dijelaskan pada setiap pos; 5) informasi yang belum disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah namun diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta 6) informasi yang dapat dimanfaatkan dalam laporan keuangan agar terlaksananya penyajian yang wajar, dan tidak diungkapkan pada halaman awal laporan keuangan.

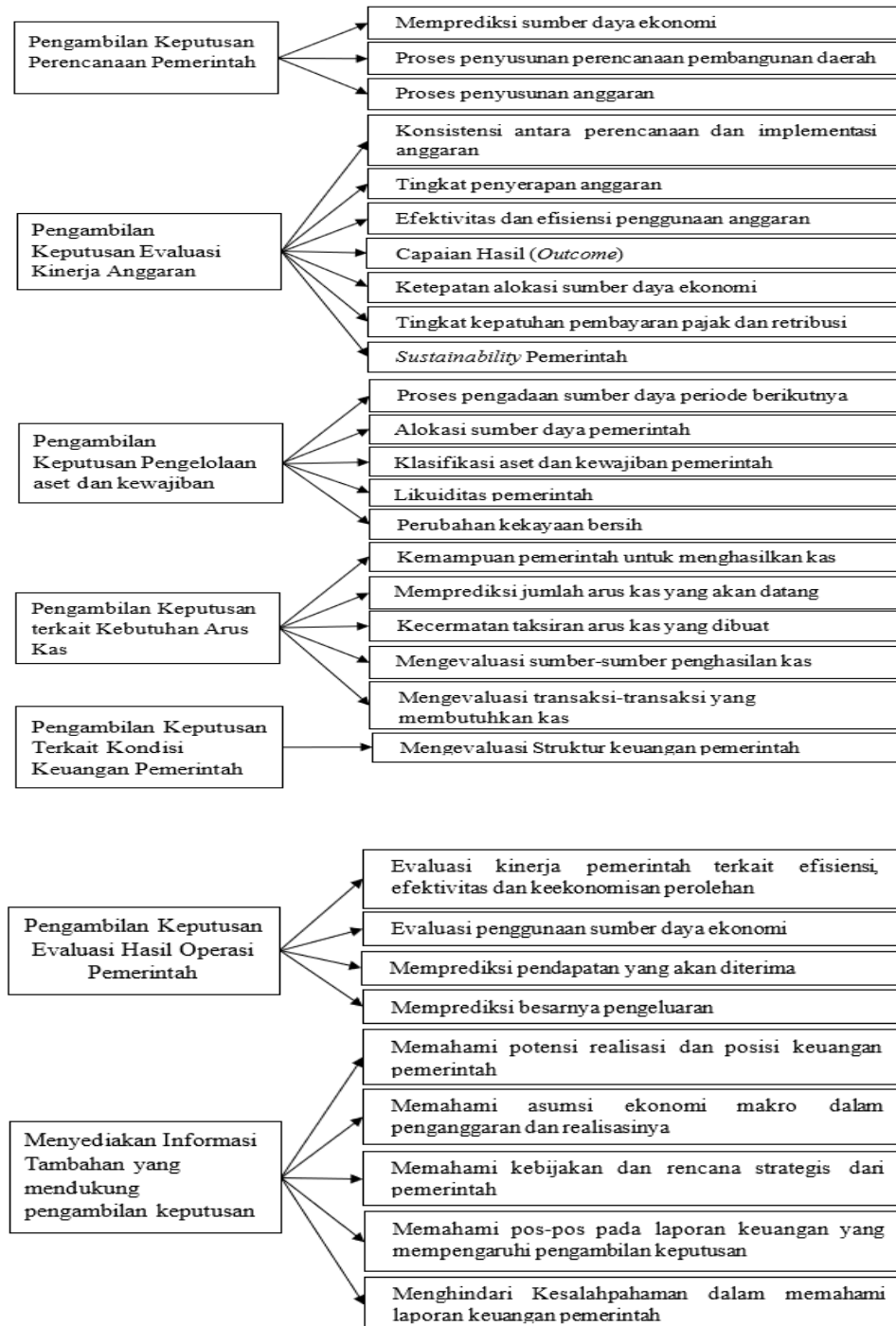
Dengan demikian, Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjabaran narasi atas nilai kuantitatif yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan beserta penggunaan kebijakan akuntansi yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah untuk mencapai tingkat penyajian yang wajar laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan memiliki peran sentral yang ditujukan sebagai pelengkap untuk komponen laporan keuangan lainnya agar informasi yang disajikan memudahkan pengguna dalam memahami informasi pada laporan keuangan, sehingga laporan keuangan memiliki nilai untuk dasar pengambilan keputusan pemerintah (Suhartanto, 2013).

Relevansi Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan ekuitas dalam Pengambilan Keputusan

Laporan operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban menggunakan basis akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Laporan operasional berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait efektivitas dan efisiensi , serta untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yg dikelola oleh pemerintah, juga untuk memprediksi kemungkinan pendapatan dan pengeluaran yang akan diterima oleh pemerintah. Laporan perubahan ekuitas pemerintah berguna untuk mengevaluasi perubahan kebijakan yang berpengaruh pada bertambah atau berkurangnya ekuitas. Sedangkan informasi mengenai saldo anggaran lebih, koreksi kesalahan pembukuan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran secara komperatif setiap tahunnya disajikan pada laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Berdasarkan kajian literatur di atas, maka relevansi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan dapat disarikan sebagai berikut :





Gambar 1. Laporan Keuangan Dan Jenis Keputusan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus di Pemerintah Kota Depok. Moleong (2012) mengatakan penelitian ini diterapkan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara menyeluruh, dimana nantinya akan dilakukan deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata dalam konteks alamiah dengan menggunakan metode alamiah. Metode yang digunakan adalah metode studi dekriptif, dimana menerangkan kegunaan komponen laporan keuangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan pada pemerintah Kota Depok.

Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Data penelitian ini diperoleh dari informan, responden dan dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Daerah, Kepala bagian di Badan Keuangan Daerah, Kepala bidang dan kepala seksi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Sekretaris Inspektorat, Kepala bidang di Dinas Pendidikan, Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Auditor di Badan Pemeriksa Keuangan. Responden juga berasal dari instansi yang sama dengan para informan, tetapi tidak semua responden menjadi informan, hanya beberapa responden saja. Dokumen yang diteliti berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan para informan, juga penyebaran kuesioner, serta analisis dokumen. Kuesioner yang diberikan berupa form checklist.

Uji Keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan diuji validitas dan realibilitasnya menggunakan content validity dan triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan cara : 1) hasil wawancara dicocokkan dengan jawaban dari kuesioner; 2) hasil wawancara dari satu informan dikonfirmasi dengan informan lainnya. Sedangkan uji realibilitas data dilakukan dengan stabilitas dan konsistensi data.

Teknik Analisis Data

Data berupa jawaban kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk masing-masing jenis laporan keuangan dan pemanfaatannya, dengan mencari modus atas pemanfaatan komponen laporan keuangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Untuk data hasil wawancara dianalisis menggunakan model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkesinambungan hingga tuntas, sehingga data yang dihasilkan cenderung jenuh. Data hasil wawancara terlebih dahulu akan dilakukan data reduction untuk informasi yang tidak relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya yang terkait dengan pemanfaatan laporan keuangan dalam tiap jenis keputusan. Laporan keuangan yang akan dianalisis manfaatnya dalam pengambilan keputusan meliputi LRA, Neraca, LAK, LO, LPE, LP SAL, dan CaLK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Depok

Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan beberapa provinsi meliputi Provinsi DKI Jakarta dan Banten, sehingga memiliki kepadatan penduduk sejumlah 10.833 jiwa/Km² dengan potensi unggulan perekonomian meliputi sub sektor perdagangan, hotel, restoran dan subsektor jasa.

Deskripsi Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang terdapat pada pemerintah Kota Depok. Adapun, instansi yang dapat dilakukan wawancara dan penyebaran kuesioner meliputi Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Depok

Kegunaan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Informasi keuangan yang terdapat pada komponen laporan keuangan pemerintah daerah telah dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan pada Pemerintah Kota Depok. Dari hasil wawancara diketahui bahwa para pengambil keputusan telah mempertimbangkan informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan, baik laporan keuangan pemerintah daerah

ataupun laporan keuangan – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses pengambilan keputusannya. Laporan keuangan – OPD terutama dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan internal dalam OPD. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah juga digunakan pada saat *review* laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan *single person theory of decision* dimana pemanfaatan komponen laporan keuangan pemerintah daerah dapat membantu memahami sesuatu yang akan berguna dalam pengambilan keputusan rasional. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Andriani *et al* (2010) bahwa informasi laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual memiliki kebermanfaatan dalam 16 dari 19 konteks pengambilan keputusan. Namun demikian hasil penelitian ini kurang sesuai dengan hasil penelitian Natalia dan Marwata (2014) bahwa LKPD Pemkot Salatiga kurang berguna dalam 12 konteks pengambilan keputusan.

Manfaat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Pengambilan Keputusan

Berikut merupakan hasil pengolahan data kuesioner atas pemanfaatan LRA dalam pengambilan keputusan, yaitu:

Tabel 1
Hasil Kuesiner (*formchecklist*) untuk kegunaan LRA

Laporan Realisasi Anggaran				
Perencanaan Pemerintah	Frekuensi Jawaban		Total Jawaban	Persentase Dimanfaatkan
	D	TD		
P1	14	7	21	66,67%
P2	20	1	21	95,24%
P3	21	0	21	100%
Evaluasi Kinerja Anggaran	Frekuensi Jawaban		Total Jawaban	Persentase Dimanfaatkan
	D	TD		
P4	21	0	21	100%
P5	21	0	21	100%
P6	21	0	21	100%
P7	21	0	21	100%
P8	18	3	21	85,71%
P9	14	7	21	66,67%
P10	17	4	21	80,95%

Sumber : hasil pengolahan data oleh peneliti

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 66,67% responden mengatakan LRA dapat membantu dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima (P1). Sementara itu, responden yang menjawab tidak dimanfaatkannya laporan realisasi anggaran dalam memprediksi sumberdaya ekonomi yang akan diterima pemerintah daerah, bukan berarti LRA tidak memiliki manfaat, tetapi responden tersebut bukan berasal dari dinas penghasil. Sebanyak 95,24% responden menyatakan LRA berguna dalam membantu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah (P2). Semua responden menyatakan LRA berguna dalam membantu proses penyusunan anggaran Pemerintah Kota Depok (P3), membantu dalam menilai konsistensi antara perencanaan dan implementasi anggaran Pemerintah Kota Depok (P4), menilai tingkat penyerapan anggaran (P5), menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran (P6) dan mengevaluasi capaian hasil yang diperoleh pemerintah (P7). Sementara itu tidak semua responden menyatakan LRA berguna dalam menilai ketepatan alokasi sumber daya ekonomi (P8), untuk menilai kepatuhan pajak dan retribusi (P9), dan menilai sustainability pemerintah.

Responden yang menjawab tidak dimanfaatkannya LRA dalam menilai kepatuhan pajak dan retribusi, karena responden tersebut bukan berasal dari dinas penghasil.

Jawaban responden tersebut dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan para informan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa LRA dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan daerah terutama dalam analisis pengelolaan keuangan pemerintah. Sementara pada tahap evaluasi kinerja pemerintah diketahui bahwa LRA telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menilai tingkat penyerapan, kesesuaian dengan perencanaan, menilai efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran, menilai tingkat kemandirian dan capaian hasil dari pemerintah Kota Depok. Laporan Realisasi Anggaran OPD juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan evaluasi kinerja anggaran dalam lingkup OPD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2015) bahwa LRA menyediakan informasi berguna untuk perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan kerangka ekonomi perencanaan pembangunan daerah dan digunakan untuk memproyeksikan kebijakan keuangan pemerintah daerah. Juga sesuai dengan penelitian Diah Agustijanti (2018), bahwa LRA berguna dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, serta sesuai dengan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, bahwa LRA menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Manfaat Neraca dalam Pengambilan Keputusan.

Berikut merupakan hasil pengolahan data kuesioner untuk kegunaan neraca dalam pengambilan keputusan, yaitu :

Tabel 2
Hasil Kuesiner (*formchecklist*) untuk kegunaan Neraca

Neraca				
Pengelolaan Aset dan Kewajiban	Frekuensi Jawaban		Total Jawaban	Persentase Dimanfaatkan
	D	TD		
P1	21	0	21	100%
P2	17	4	21	80,95%
P3	17	4	21	80,95%
P4	14	7	21	66,67%
P5	21	0	21	100%
P6	21	0	21	100%
P7	16	5	21	76,19%

Sumber : hasil pengolahan data oleh peneliti

Tabel jawaban responden di atas menunjukkan semua responden menyatakan bahwa informasi pada neraca membantu dalam pengambilan keputusan pengadaan kebutuhan sumber daya pada periode berikutnya dan keperluan jangka panjang pemerintah (P1), melakukan klasifikasi aset dan kewajiban pemerintah (P5) dan menilai klasifikasi aset dan kewajiban pemerintah (P6). Sebanyak 80,95% responden menyatakan neraca membantu dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya (P2) dan melakukan evaluasi keputusan alokasi sumber daya pada periode pelaporan (P3). Sedangkan sebanyak untuk keputusan tentang evaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas pemerintah, hanya sebanyak 76,19% responden menyatakan neraca bermanfaat. Dan sebanyak 66,67% responden menyatakan neraca bermanfaat dalam menilai likuiditas Pemerintah. Responden yang tidak menyatakan neraca bermanfaat dalam menilai likuiditas, karena responden tersebut tidak memiliki tupoksi berkaitan dengan

penilaian likuiditas. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa semua informan sepakat kalau neraca berguna dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan aset dan kewajiban.

Hasil penelitian sesuai dengan yang PSAP 01 tentang Penyusunan Laporan Keuangan, bahwa neraca menyediakan informasi yang berguna untuk mengetahui barang-barang yang dapat digunakan pada periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan dalam periode jangka panjang, menilai likuiditas dan menilai klasifikasi atas aset dan kewajiban. Juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Marwata (2014) bahwa neraca berguna dalam pengelolaan aset dan kewajiban. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Barton (2002) dalam Sousa *et al* (2013) yang menemukan bahwa neraca kurang relevan untuk melakukan pengambilan keputusan terkait pengadaan barang dan jasa.

Manfaat Laporan Arus Kas dalam Pengambilan Keputusan

Berikut merupakan hasil pengolahan data kuesioner kegunaan LAK dalam pengambilan keputusan, yaitu:

Tabel 3 Hasil Kuesiner (<i>formchecklist</i>) untuk kegunaan LAK				
Laporan Arus Kas				
Kebutuhan Arus Kas	Frekuensi Jawaban		Total Jawaban	Persentase Dimanfaatkan
	D	TD		
P1	14	7	21	66,67%
P2	13	8	21	61,90%
P3	14	7	21	66,67%
P4	13	8	21	61,90%
P5	14	7	21	66,67%
Kondisi Keuangan Pemerintah	Frekuensi Jawaban		Total Jawaban	Persentase
	D	TD		
P6	12	9	21	57,14%

Sumber : hasil pengolahan data oleh peneliti

Dari tabel di atas dapat dilihat 66,67% responden menyatakan bahwa informasi pada LAK berguna dalam menilai kemampuan pemerintah untuk menghasilkan kas (P1), menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat (P3) dan mengevaluasi transaksi-transaksi yang membutuhkan kas (P5), sementara hanya 61,90% responden menyatakan bahwa informasi LAK dapat membantu dalam memprediksi jumlah arus kas dimasa yang akan datang (P2) dan mengevaluasi sumber-sumber penghasil kas (P4). Responden yang tidak memanfaatkan informasi dalam LAK untuk pengambilan keputusan adalah responden yang instansinya tidak menyusun LAK, sehingga kebutuhan akan informasi dalam LAK juga tidak tinggi.

Jawaban responden dikonfirmasi dengan hasil wawancara mengenai kegunaan LAK dalam pengambilan keputusan. Dari hasil wawancara diketahui LAK memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan untuk memprediksi dan melakukan taksiran atas penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah daerah dan untuk mengevaluasi atas taksiran yang telah dilakukan. Akan tetapi para informan juga mengatakan bahwa LAK kurang memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan mengenai evaluasi atas struktur keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAK memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan terkait prediksi arus kas di masa depan. Hal ini sesuai dengan PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas, dimana dinyatakan bahwa informasi LAK berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Namun, hal ini berlawanan dengan penelitian Gonzalez *et al* (2018) bahwa informasi pada laporan arus kas dinilai kurang memiliki relevansi dalam pengambilan keputusan. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas juga menjelaskan bahwa apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, informasi LAK memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi struktur keuangan pemerintah termasuk likuiditas dan solvabilitas (Kondisi keuangan). Tetapi dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa LAK kurang memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan mengenai evaluasi atas struktur keuangan pemerintah daerah.

Kegunaan Laporan Operasional dalam Pengambilan Keputusan

Berikut merupakan hasil pengolahan data kuesioner kebermanfaatan LO dalam pengambilan keputusan, sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Kuesiner (*formchecklist*) untuk Kegunaan LO

Evaluasi Hasil Operasi Pemerintah	Laporan Operasional			
	Frekuensi Jawaban		Total Jawaban	Persentase Dimanfaatkan
	D	TD		
P1	17	4	21	80,95%
P2	18	2	21	85,71%
P3	14	7	21	66,67%
P4	20	1	21	95,24%

Sumber : hasil pengolahan data oleh peneliti

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa 80,95% responden menyatakan informasi laporan operasional (LO) dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait efisiensi, efektivitas dan keekonomisan perolehan (P1). Sebanyak 85,71% responden menyatakan LO berguna untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi (P2), 66,67% responden berpendapat bahwa LO berguna dalam melakukan prediksi mengenai pendapatan yang akan diterima (P3). Sebanyak 95,25% responden menyatakan LO berguna dalam dalam memprediksi besarnya pengeluaran yang akan ditanggung pemerintah (P4).

Hasil wawancara mendukung hasil kuesioner bahwa informasi laporan operasional (LO) telah dijadikan sebagai pertimbangan dalam menilai efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasi pemerintah, melihat informasi pendapatan dan beban dan melakukan prediksi atas kemungkinan pengeluaran yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, serta menjadi dasar dalam proses perencanaan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi beberapa informan mengatakan bahwa terdapat anggapan bahwa laporan operasional dibuat hanya memenuhi ketentuan basis akrual, sehingga pemanfaatannya belum optimal.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa LO memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan mengenai evaluasi hasil operasi pemerintah. Ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam PSAP 12 tentang Laporan Operasional bahwa informasi dalam LO berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan perolehan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah

dan berguna dalam memprediksi pendapatan yang akan diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Galera (2016) bahwa *income statement* dipandang relevan menganalisis operasi pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa, karena memberikan gambaran pendapatan dan pengeluaran yang mempengaruhi kelangsungan keuangan pemerintah.

Manfaat CaLK dalam Menunjang Pengambilan Keputusan

Berikut merupakan hasil pengolahan data kuesioner mengenai kegunaan CaLK dalam pengambilan keputusan, yaitu :

Tabel 5				
Hasil Kuesiner (<i>formchecklist</i>) untuk Kegunaan CaLK				
Catatan atas Laporan Keuangan				
Informasi Tambahan yang mendukung pengambilan keputusan	Frekuensi Jawaban		Total Jawaban	Persentase Dimanfaatkan
	D	TD		
P1	21	0	21	100%
P2	21	0	21	100%
P3	21	0	21	100%
P4	21	0	21	100%
P5	19	2	21	90,48%

Sumber : hasil pengolahan data oleh peneliti

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua responden menyatakan informasi Catatan atas Laporan Keuangan dapat membantu dalam memahami potensi realisasi dan posisi keuangan pemerintah (P1); memahami asumsi ekonomi makro dalam penganggaran dan realisasinya (P2); memahami kebijakan dan rencana strategis dari pemerintah (P3); dan memahami pos-pos pada laporan keuangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan (P5). Sebanyak 90,48% responden menyatakan CaLK memiliki rmanfaat untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan pemerintah. Hasil wawancara dengan para informan mendukung hasil kuesioner terkait rmanfaat Catatan atas Laporan Keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan. Informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuanga nmem bantu pembaca dalam memahami informasi pada lembar muka laporan keuangan pemerintah daerah dan meminimalisasi kesalahpahaman dalam memahami isi dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dinyatakn dalam PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan dimana informasi CaLK berisi informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Informasi CaLK berguna untuk meminimalisasi asimetri informasi sesuai dengan *agency theory* dimana pengambilan keputusan keuangan melibatkan banyak kepentingan.

Manfaat Akun-akun Laporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan

Hasil wawancara dengan para informan menghasilkan informasi bahwa akun-akun yang memiliki kaitan dengan anggaran dan realisasinya meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan lebih dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintah terutama pengambilan keputusan mengenai evaluasi kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan jenis

akun tersebut dianggap menggambarkan pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah selama tahun anggaran yang dilaporkan.

Informasi yang perlu ditambahkan pada laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil wawancara juga memberikan masukan mengenai informasi yang perlu ditambahkan dalam laporan keuangan agar laporan keuangan memberikan manfaat yang optimal. Informasi yang perlu ditambahkan tersebut adalah :

- Informasi non keuangan yang menjelaskan mengenai pelayanan yang dilakukan pemerintah dan informasi yang menjelaskan keberhasilan dan hambatan atas kinerja yang diungkapkan secara lebih detail dengan tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya
- Informasi analisis keuangan berupa rasio-rasio keuangan daerah; informasi mengenai prediksi keuangan daerah, serta potensi keuangan yang akan diperoleh Pemerintah Kota Depok di masa depan.
- Informasi secara lebih detail mengenai pencapaian kinerja dari masing-masing dinas terkait pelayanan terhadap masyarakat berserta kendala yang dihadapi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tiap komponen laporan keuangan pemerintah daerah memiliki rmanfaat dalam pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan di Pemerintah Kota Depok. Masing-masing komponen laporan keuangan memiliki manfaat untuk pengambilan keputusan yang berbeda, yaitu :

- LRA memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
- Neraca memiliki rmanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan aset dan kewajiban
- LAK memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan mengenai kebutuhan arus kas, namun kurang memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan mengenai kondisi keuangan, karena dalam praktiknya lebih memanfaatkan LRA, sehingga LAK kurang dimanfaatkan secara optimal.
- LO memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan mengenai evaluasi hasil operasi Pemerintah Kota Depok. Namun LO dibuat hanya untuk memenuhi ketentuan basis akrual, sehingga pemanfaatannya belum optimal.
- Catatan atas Laporan Keuangan memiliki manfaat dalam menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan, yaitu meminimalisasi bias informasi yang terdapat pada lembar muka laporan keuangan.
- Akun-akun yang berkaitan dengan anggaran, meliputi pendapatan asli daerah, belanja dan pembiayaan merupakan akun yang diberikan perhatian lebih oleh sebagian besar pengguna laporan keuangan Pemerintah Kota Depok.

Implikasi dari penelitian

Bagi penyusun laporan keuangan di instansi pemerintah sebaiknya memberikan penjelasan tambahan yang lebih lengkap dan rinci mengenai kondisi dan pengelolaan keuangan instansinya, termasuk rasio-rasio keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, selain informasi yang diharuskan dalam standard akuntansi keuangan pemerintahan.

Agar laporan keuangan memberikan manfaat yang lebih optimal, maka akan lebih baik jika laporan keuangan bisa dipublikasikan tidak lama setelah periode pelaporan berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y., Kober, R., & NG, J. (2010). Decision Usefulness of Cash and Accrual Information: Public Sector Managers' Perceptions. *Australian Accounting Review No. 53 Vol. 20 Issue 2* , 144-153.
- Djuminah, & Susanto, D. (2015). Usefulness of Local Government Financial Statements for Regional Development Planning Process (An Empirical Study Against the Head of the District Development Planning Agencies in Java and Madura). *2nd Global Conference on Business and Social Science-2015* (pp. 75-80). Bali: Elsevier.
- Ernst & Young. (2010). Toward Transparency A Comparative Study of Governmental Accounting in Europe. *[S.I.]*, 1-14.
- Galera, A. N., Bolivar, M. P., Munoz, L. A., & Subires, M. D. (2016). Measuring the financial sustainability and its influential factors in local governments. *Applied Economics*, 3961-3975
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory*. Australia: John Wiley & Sons .
- Gonzalez, R. M., Ruiz, A. G., & Bargues, J. M. (2018). The Recent Reform of Spanish Local Governmental Accounting: A Critical Perspective from Local Governmental Accountants as Internal Users of Budgeting and Financial Accounting Information. *Journal of Local Self- Government*, 453-476.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2*, 53-64.
- Kobayashi, M., Yamamoto, K., & Ishikawa, K. (2016). The Usefulness of Accrual Information in Non-mandatory Environments: The Case of Japanese Local Government. *Australian Accounting Review No. 77 Vol. 26 Issue 2* , 153-161.
- Kober, R., Lee, J., & NG, J. (2010). Mind Your Accruals: Perceived Usefulness of Financial Information in The Australian Public Sector Under Different Accounting Systems. *Financial Accountability & Management*, 0267-4424.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2015, February 16). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01*. Retrieved from Wikiapbn - Ensiklopedia Kementerian Keuangan: <http://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-01/>
- Lasmaria, K. (2014). *Pengaruh Stakeholder Engagement Terhadap Pengungkapan Sustainability Report*. Semarang: Undip.
- Mainardes, E. W., Alves, H., & Raposo, M. (2011). Stakeholder theory: issues to resolve. *Management Decision*, 226-252.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, J. (2012). *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Natalia, C., & Marwata. (2014). Persepsi Akademisi Terhadap Decision Usefulness dan Understandability Laporan Keuangan Pemerintah Salatiga. *Economics & Business Research Festival*, 1593-1619.
- Octavia, M. (2018, February 17). *Decision Usefulness Theory Articles*. Retrieved from Bina Nusantara: <http://binus.ac.id/malang/2018/02/decision-usefulness-theory/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (Accesed 2018, 09 27). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. Retrieved from DJPK Departemen Keuangan: <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>

- Pessina, E. A., Barbera, C., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2016). Public sector budgeting: A European review of accounting and public-management journals. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 29 Issue: 3, 491-519.
- Pratiwi, A. I. (2010). Decision Usefulness : Berdasarkan Teori Keputusan dan Teori Investasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi ASIA*, 100-112.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business*. United Kingdom: Wiley.
- Sousa, R. G., Vasconcelos, A. F., Caneca, R. L., & Niyama, J. K. (2013). Accrual Basis Accounting in the Brazilian Public Sector: Empirical Research on the Usefulness of Accounting Information. *USP, Sao Paulo*, v. 24, 219-230.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartanto. (2013). *Efektivitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Manajemen Pemerintah Daerah*. Pusdiklat Pengawasan BPKP.
- Sukmaningrum, Tantriani, & Harto, P. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Susanto, D. (2015). *Kebermanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Bagi Proses Perencanaan Pembangunan Daerah*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Suwardjono. (2006). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Trihani, I. (2018). *Analisis Manfaat Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah*. Padang: Universitas Padang.